

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang terletak di Asia Tenggara, Indonesia juga fokus dalam pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi. Salah satu usaha yang memberi kontribusi terhadap pembangunan dan percepatan pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, UMKM dideskripsikan sebagai kegiatan usaha yang mampu memperluas lapangan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi dan berperan dalam mewujudkan stabilitas nasional. Peranan UMKM dalam menunjang stabilitas fundamental perekonomian Indonesia dapat dilihat dari data Kementerian Koperasi dan UMKM tahun 2018, UMKM menyuplai produk domestik bruto (PDB) sebesar 61,07% atau senilai Rp 8,574 triliun dari total PDB Indonesia serta menyerap tenaga kerja sebesar 96,97% atau sejumlah 117 juta tenaga kerja di Indonesia.

Tabel 1.1 Data UMKM di Indonesia Tahun 2018

| Jenis Usaha | Usaha (unit) | Tenaga Kerja (jiwa) | PDB (dalam miliar rupiah) | Investasi (dalam miliar rupiah) |
|----------------|--------------|---------------------|---------------------------|---------------------------------|
| Usaha Mikro | 63.350.222 | 107.376.540 | 5.303.075,7 | 290.840,2 |
| Usaha Kecil | 783.132 | 5.831.256 | 1.347.104,3 | 996.666,1 |
| Usaha Menengah | 60.702 | 3.770.835 | 1.923.715,4 | 1.277.043,2 |
| Usaha Besar | 5.550 | 3.619.507 | 5.464.703,2 | 1.680.136,1 |

(sumber data dari Kementerian Koperasi dan UKM)

Tabel 1.1 tersebut dapat menunjukkan peranan UMKM pada PDB serta penyerapan jumlah tenaga kerja di Indonesia tetapi tidak sebanding dengan jumlah investasi yang diterima, pada artikel milik *Portal Informasi Indonesia* pada Kamis, 26 September 2019 menyatakan sekalipun posisi UMKM belum signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara nasional namun UMKM telah terbukti berperan penting menjadi *backbone* dan *bufferzone* yang menyelamatkan Indonesia dari keterpurukan ekonomi dengan mampu melewati dua krisis yakni krisis moneter tahun 1997-1998 dan krisis keuangan global tahun 2008-2009, sehingga tidak bisa diremehkan peranan UMKM dalam perekonomian Indonesia.

Pada tahun 2020 perekonomian Indonesia mengalami penurunan kembali akibat adanya krisis kesehatan global yang disebabkan virus COVID-19. Ini diakibatkan dari regulasi pemerintah dalam membendung penyebaran virus yang menyebabkan adanya pembatasan segala kegiatan sosial seperti perdagangan, industri, wisata dan bahkan pendidikan. Survei yang dilakukan oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI) terhadap 6000 UMKM di seluruh Indonesia pada bulan April-Mei 2020 menunjukkan sebanyak 36,7 persen responden tidak ada penjualan dan 60% responden mengalami penurunan penjualan

Tabel 1.2 Data Indikator Penjualan UMKM

| Indikator Penjualan UMKM | Responden (%) |
|---------------------------------|----------------------|
| Penurunan >60% | 26,6 |
| Penurunan 31 sampai 60% | 15 |
| Penurunan 10% sampai 30% | 14,2 |
| Tidak ada penjualan | 36,7 |
| Sama | 4,5 |
| Mengalami Peningkatan | 3 |

(sumber data survei pada 6000 UMKM oleh Asosiasi Business Development Services Indonesia (ABDSI)).

Pada kondisi krisis diharap entitas dapat menjaga aliran kas agar keberlangsungan usaha tetap berjalan dengan baik walaupun sedang mengalami penurunan omzet penjualan, bisa dengan mengajukan pengajuan kredit jika memang dirasa perlu untuk menutup beberapa pos biaya tetap yang mana harus tetap dibayar seperti biaya sewa, utilitas ataupun gaji karyawan.

Teori entitas menyatakan bahwa perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik. Hal tersebut berarti terdapat pemisah antara kepentingan pribadi pemilik dengan kepentingan perusahaan. Dengan demikian, transaksi/kejadian yang dicatat dan dipertanggungjawabkan adalah transaksi yang melibatkan perusahaan. Perusahaan dianggap bertindak atas nama dan kepentingannya sendiri terpisah dari pemilik (Ghozali dan Chariri, 2014:296). Dengan menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan standar, UMKM dapat memenuhi syarat untuk memperoleh kebutuhan modal (pengajuan kredit), dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang memberi modal serta dengan menyusun laporan keuangan berbasis SAK EMKM dapat mencerminkan adanya pemisah antara keuangan perusahaan dengan uang pribadi, karena perusahaan merupakan unit usaha yang berdiri sendiri terpisah dari identitas pemilik.

Menurut Rudiantoro dan Siregar (2012) informasi keuangan yang akuntabel dan transparan akan mempermudah UMKM dalam memenuhi salah satu persyaratan dalam pengajuan pinjaman kredit namun banyak UMKM tidak menerapkan pencatatan laporan keuangan karena bukan suatu hal yang penting dalam proses kelangsungan usaha serta mengingat latar belakang pendidikan yang tidak memahami pembukuan keuangan, kurang disiplin dalam melaksanakan pembukuan dan tidak semua UMKM memiliki dana yang cukup untuk memperkerjakan tenaga akuntan sehingga seringkali keuangan pribadi pemilik dan UMKM masih belum terpisah karena tidak memiliki pencatatan yang jelas.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan SAK EMKM pada kegiatan usaha UMKM. Hasil penelitian Mubiroh, Siti dan Ruscitasari, Zulfatun (2019) menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan dan latar belakang pendidikan pemilik UMKM tidak berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Sedangkan variabel pemberian sosialisasi dan informasi berpengaruh signifikan terhadap implementasi SAK EMKM. Kemudian, variabel implementasi SAK EMKM berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dan variabel kualitas laporan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan kredit UMKM. Hasil penelitian Rahmawati, Teti dan Rita Puspitasari, Oktaviani (2017) ukuran usaha, lama usaha berdiri, pemberian informasi dan sosialisasi SAK ETAP, latar belakang dan jenjang pendidikan terakhir pelaku usaha, serta profesionalisme manajemen berpengaruh terhadap pemahaman pelaku UMKM terkait implementasi SAK ETAP. Dampak dari implementasi SAK ETAP memberikan indikasi kuat bahwa kualitas laporan keuangan berpengaruh terhadap besarnya kemudahan akses modal perbankan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah jenjang pendidikan pengusaha berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM?
2. Apakah sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM?
3. Apakah lama usaha berdiri berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM?
4. Apakah profesional manajemen berpengaruh terhadap implementasi SAK EMKM?
5. Apakah jenjang pendidikan pengusaha, sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM, lama usaha dan profesional manajemen berpengaruh secara simultan pada implementasi SAK EMKM?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui pengaruh latar belakang pendidikan pengusaha terhadap implementasi SAK EMKM.
2. Untuk mengetahui pengaruh sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM terhadap implementasi SAK EMKM.
3. Untuk mengetahui pengaruh lama usaha berdiri terhadap implementasi SAK EMKM?
4. Untuk mengetahui pengaruh profesional manajemen terhadap implementasi SAK EMKM.
5. Untuk mengetahui pengaruh jenjang pendidikan pengusaha, sosialisasi dan pelatihan SAK EMKM, lama usaha dan profesional manajemen secara simultan pada implementasi SAK EMKM.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperkenalkan mengenai SAK EMKM bagi entitas UMKM yang belum mengetahui dan memberikan bukti empiris tentang faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi SAK ETAP pada UMKM.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pemilik UMKM

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai SAK EMKM guna penyusunan laporan keuangan entitas UMKM yang sah dan sesuai kebutuhan.

b. Bagi Dinas Koperasi dan UMKM Kota Wisata Batu

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang faktor – faktor implementasi SAK EMKM pada UMKM guna mendorong penggunaan SAK EMKM bagi entitas UMKM.

c. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan edukasi dan mengenalkan salah satu contoh SAK yang ada dan berlaku di Indonesia.